



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AAN JAELANI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 924628

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/106 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m²/20 m² di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 1.892 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. Tanah Seluas 290 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 172 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 167 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 1.431 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
9. Tanah Seluas 48 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
10. Tanah Seluas 1.306 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	268.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO (R.01) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO (SOLO) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T / MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	161.742.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	111.548.464
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.916.790.964
III. HUTANG	Rp.	23.544.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.893.246.964

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.